



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 2 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03 Bandung

Ricky Yoseptry¹, Salmah², Muhammad Nasir³, Idan Darmawan⁴

1. Universitas Islam Nusantara Bandung, rickyoseptry@uninus.ac.id
2. Universitas Islam Nusantara Bandung, salmah@uninus.ac.id
3. Universitas Islam Nusantara Bandung, muhammadnasir@uninus.ac.id
4. Universitas Islam Nusantara Bandung, idandarmawan@uninus.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 26, 2023

Revised : February 27, 2023

Accepted : March 19, 2023

Available online : April 28, 2023

How to Cite: Ricky Yoseptry, Salmah, Muhammad Nasir and Idan Darmawan (2023) "Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03 Bandung", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), pp. 553–566. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i2.571.

Management of School Operational Assistance (BOS) in Improving the Quality of Education at Cangkring 03 Public Elementary School Bandung

Abstract. School financial management is a substantive field of educational administration that specifically handles tasks related to financial management that are owned and used by school principals. It is undeniable that schools need a large education budget, especially for construction and maintenance activities of school buildings, procurement of school equipment and supplies, as well as

school operational financing activities. The School Operational Assistance Program (BOS) is a form of government responsibility in financing the implementation of education in order to create an increase in the quality of education. Cangkring 03 Baleendah Public Elementary School Bandung is a school that is funded using BOS funds. The purpose of this study was to determine the management of school operational assistance (BOS) financing in improving the quality of education at SDN Cangkring 03. This study used a qualitative approach with descriptive methods through observation, interviews and documentation. There were problems in planning, implementation and evaluation, even though the use of BOS funds had been carried out according to technical instructions.

Keywords: Funding Management, School Operational Assistance, Elementary School Quality

Abstrak. Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk aktivitas pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, serta aktivitas pembiayaan operasional sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03 Baleendah Bandung merupakan sekolah yang pembiayaannya menggunakan dana BOS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Cangkring 03. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat kendala yang terjadi baik di perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, walaupun penggunaan dana BOS telah dilakukan sesuai petunjuk teknis.

Kata Kunci: Manajemen Pembiayaan, Bantuan Operasional Sekolah, Mutu Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab dilakukan orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak dewasa dan berlangsung terus menerus semenjak dilahirkan sampai meninggal. Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggungjawab serta mampu melalui masa depan. Tilaar dan Nugroho (2008; 8) menyebutkan bahwa: Pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (resiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya.

Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien

suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan dibidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat. Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah menurut Kadarman dan Udaya (1992: 78) adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah,
3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Mulyasa (2016 : 195) mengatakan bahwa:Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah wajib memberi layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan menjamin tidak terbebani oleh biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrument (instrumental input) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Satu diantara instrumen yang penting dalam manajemen pembiayaan adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan anggaran dan pengembangan RKAS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan pesertadidik, 2) inflasi, 3) pengembangan program dan perbaikan, 4) proses pengajaran dan pembelajaran. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan kebijakan alokasi program dana BOS tersebut, kegiatan belajar dan mengajar di SDN Cangkring 03 selama ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 8 standar pengelolaan sekolah hal ini dibuktikan dengan hasil akreditasi sekolah dengan nilai B.

Namun kenyataan dilapangan peneliti mendapatkan informasi bahwa pihak pengelola dana bos dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara BOS sering menjumpai berbagai permasalahan di sekolah, diantaranya adalah:

1. Sekolah sering mengadakan kegiatan yang dananya tidak teranggarkan di RKAS,

sementara kegiatan lain yang sudah terencana dan teranggarkan di RKAS harus berjalan, hal inilah yang membuat bendahara BOS dan Kepala sekolah kesulitan dalam mencari dana insidental.

2. Sering terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS, sementara kegiatan yang sudah terprogram di RKAS harus tetap berjalan, hal ini menjadi kesulitan Kepala Sekolah dan bendahara BOS mencari dana talangan.
3. Kurangnya partisipasi guru dan pembina kegiatan dalam menyusun RAB kegiatan sekolah, sehingga bendahara kesulitan dalam pengalokasian dana BOS di RKAS

Dari permasalahan di atas maka Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu Pendidikan, dan secara Khusus, 1) Untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang perencanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu Pendidikan 2) Untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu Pendidikan. 3) mendapatkan informasi atau gambaran tentang Evaluasi Bantuan Untuk Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan instrumen pengumpulan data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan informasi hasil temuan dari sumber-sumber data yang diperoleh (Qomusuddin & Romlah, 2021).

Aan Komariah (2011:23) mengatakan penelitian yang bersifat kualitatif adalah untuk mengeksplor beberapa fenomena-fenomena yang dijabarkan secara deskriptif, maka dapat dikatakan penelitian kualitatif deskriptif adalah rangkaian suatu kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna.

Subjek penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03 Baleendah Bandung. Prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Di sini peneliti mewawancarai guru, bendahara dan kepala sekolah guna mencari data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil temuan atas sumber-sumber yang berasal dari lapangan. Penelitian ini mengambil sumber data yang berasal dari Sekolah Dasar Negeri 03 Cangkring Baleendah Bandung untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pembiayaan

Dari segi bahasa manajemen berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan langsung dari kata management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Sementara dalam kamus Inggris Indonesia karangan John M. Echols dan Hasan Shadily (1995 : 372) management berasal dari akar kata to

manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan.

Helmawati (2015:19) mengutip Stoner mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Sementara manajemen menurut istilah adalah proses mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbin dan Coulter, 2007:8). Sedangkan Sondang P Siagian (1980: 5) mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: (1).Perencanaan anggaran (Budgeting) yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis. (2) Pelaksanaan (implementation involves accounting), yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat.(3) Pertanggung- jawaban (auditing),yaitu proses penilain terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Penyusunan anggaran (penganggaran) berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Permendikbud No. 6 tahun 2021 Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam manajemen bantuan operasional sekolah (BOS) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian. Langkah ini di tempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bantuan operasional sekolah (BOS) adalah proses yang dilakukan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian/evaluasi bantuan operasional sekolah (BOS) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA / SMALB / SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah di tentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Besar biaya satuan BOS yang diterima sekolah dasar termasuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan per tahunnya sebesar Rp. 960.000/siswa.

Mutu Sekolah Dasar

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Usman (2006: 407) Defenisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam bergantung orang yang memakainya. Kata mutu di ambil dari bahasa latin "Qualis" yang artinya what kind of (tergantung dengan kata apa yang mengikutinya), dalam bahasa Inggris "quality artinya mutu, kualitas" Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan.

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai dengan 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Seringkali kali terjadi miskonsepsi dari masyarakat dan orang tua terhadap esensi dan karakteristik pendidikan dasar dan menengah.

Esensi pendidikan dasar adalah "paspor" bagi setiap peserta didik untuk pengembangan dirinya di masa depan, dan "bekal dasar" untuk dapat hidup layak dalam hidup bermasyarakat dimanapun di dunia ini. Oleh karenanya, program belajar pendidikan dasar harus mengembangkan potensi peserta didik secara terpadu

dan sinergis. Pola pembelajaran pada tingkat pendidikan dasar harus dilakukan secara terpadu, karena secara psikologis perkembangan kemampuan kognisi, kemampuan sosio-emosional, kemampuan pengembangan moral dan perkembangan fisik peserta didik usia pendidikan dasar terjadi secara terpadu dan saling ketergantungan.

Upaya untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran dibuat oleh pihak sekolah, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 3 informan, yaitu kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah. Menurut para informan di atas perencanaan anggaran di SDN Cangkring 03 mengacu pada Rencana Kegiatan sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pihak sekolah melibatkan semua komponen/warga sekolah dan komite sekolah, dengan memperhatikan sistematika penyusunan RKAS dan melihat kalender pendidikan sebagai pedoman dalam membuat jadwal belanja sekolah dan standarisasi harga yang sesuai dengan ketentuan daerah. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun bersama-sama antara warga sekolah, yaitu guru dan komite sekolah dengan tujuan agar tercipta transparansi anggaran dana.

Berdasarkan penjelasan dari kepala sekolah SDN Cangkring 03 dana diperoleh hanya dari satu sumber yaitu dana BOS dan dilarang memungut dana dari peserta didik. Dana BOS tersebut 100 % dimanfaatkan dengan baik bagi pengembangan pendidikan itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari rincian program dan kegiatan SDN Cangkring 03 tahun 2022 yang sangat berpihak kepada peningkatan kualitas pembelajaran.

Terlihat dengan jelas alokasi anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat prioritas dan penting, seperti pelibatan guru-guru dan kepala sekolah dalam MGMP dan MKKS, studi banding, pelatihan / workshop / seminar, gaji dan kesejahteraan pegawai, pemenuhan perlengkapan KBM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Cangkring 03 Tahun 2022 data terlampir pada lampiran RKS.

Dari lampiran tersebut bahwa pengelola dana BOS telah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang terinci dan sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah setiap tahun. Walaupun tidak semua item dari 13 komponen penggunaan dana BOS tertuang dalam RKAS tersebut.

Untuk mendapatkan data mengenai identifikasi, pengelompokan serta memperkirakan sumber-sumber dana yang digali dan dikembangkan pihak sekolah, peneliti mencari data melalui bendahara. Untuk mendapatkan informasi ini peneliti mengajukan 2 pertanyaan kepada bendahara yaitu; bagaimana pihak sekolah mengidentifikasi peraihan sumber-sumber dana yang akan digali dan dikembangkan?, bagaimana cara sekolah menggunakan dan mengalokasikan sumber dana tersebut ?.

Menurut bendahara identifikasi peraihan sumber-sumber dana yang akan digali dan dikembangkan pihak sekolah, yaitu hanya dana BOS,. Sementara bantuan dari komite dalam hal ini wali murid tidak diperkenankan sama sekali. Dana yang diperoleh dari BOS digunakan sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS,

sedangkan dana dari sumber lain digunakan sesuai juknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti penggunaan dana block grand untuk wokshop kurikulum 2013, kegiatan in dan on induk cluster dan pembagunan RKB.

Menurut kepala sekolah penyusunan rencana anggaran diawali dengan identifikasi tujuan. Pihak sekolah akan mengoleksi program-program yang diajukan oleh para guru, kemudian memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak, yang prioritas akan mendapat dukungan moril maupun materil dari pihak sekolah yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu program kerja yang ditetapkan dalam RKT dan RKAS, sementara yang belum dijadikan prioritas tetap mendapat suport dan dukungan, akan tetapi pelaksanaannya tidak secara permanen ditetapkan dalam RKAS. Penjelasan dari kepala sekolah tersebut berbanding lurus dengan data yang peneliti peroleh dari bendahara dan operator sekolah. Artinya ada koordinasi yang baik antara manajemen/pengelola keuangan dalam hal ini dana BOS dengan program KBM yang dilakukan oleh sekolah.

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan anggaran keuangan SDN Cangkring 03, berdasarkan interview dilapangan dengan kepala sekolah adalah mengacu pada peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX pasal 62 tentang standar pembiayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah (BOS) nomor 6 tahun 2021, 13 komponen yang boleh dibiayai dari dana BOS adalah : Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Kegiatan Evaluasi Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah, Layanan Daya dan Jasa, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga pendidikan honorer, Pembayaran Honor (Guru, Tenaga Administrasi, Pegawai Perpustakaan, Penjaga Sekolah) honorer, Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran, dan Biaya lainnya.

Untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan anggaran peneliti mengajukan 7 pertanyaan kepada Bendahara BOS, yaitu: 1. Apakah dalam pelaksanaan anggaran BOS, pengelola melakukan pembukuan? 2. Buku apa saja yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS? 3. Bagaimana teknis mencatat penerimaan dana BO? 4. Bagaimana teknis pencatatan pengeluaran dana BOS? 5. Bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS? 6. Kapan dan bagaimana teknis pelaporan dana BOS? 7. Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam melaksanakan anggaran?

Dari beberapa pertanyaan tersebut peneliti mendapat informasi bahwa bendahara SDN Cangkring 03 dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan melakukan pembukuan dengan mencatat berbagaisumber dana yang masuk beserta jumlahnya, dan distribusi penggunaannya secara rinci serta menyetorkan pajak yang harus dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku. Adapun buku yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS adalah: 1. Buku Kas Umum (BKU) yaitu buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang yang meliputi semua transaksi eksternal yang

berhubungan dengan pihak ketiga, buku ini disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. 2. Buku Kas Pembantu (BKP) buku ini digunakan untuk mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. 3. Buku Pembantu Bank (BPB) buku ini untuk mencatat tiap transaksi melalui bank, baik cek, giro maupun tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. 4. Buku Pembantu Pajak (BPP) adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Adapun teknis pencatatan penerimaan dana BOS yang dilakukan bendahara SDN Cangkring 03 adalah dengan cara dana BOS yang masuk ke rekening sekolah ditarik oleh bendahara dan kepala sekolah kemudian dicatat didalam buku kas umum dan buku kas pembantu BOS. Kemudian baru sekolah dapat membelanjakannya untuk kepentingan kegiatan dan program sekolah sesuai RKAS. Segala pengeluaran keuangan dicatat oleh bendahara di dalam buku kas pembantu secara rinci.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Dana BOS di SDN Cangkring 03 berdasarkan wawancara peneliti dengan kepada kepala sekolah dan bendahara BOS dengan mengajukan 5 pertanyaan, yaitu: 1). Apakah pengelola anggaran melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran BOS? 2). Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan anggaran dana BOS? 3). Siapa saja yang bertindak melakukan evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS? 4). Apakah hasil evaluasi pelaksanaan dan penggunaan dana BOS dijadikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana BOS? 5). Permasalahan apa saja yang menjadi kendala bagi pengelola dana BOS dalam pelaksanaan penilaian anggaran?

Hasil jawabannya adalah sebagai berikut: evaluasi penggunaan dan pertanggung jawaban dana BOS selalu dilakukan baik oleh pengelola dana BOS sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan oleh Inspektorat. Teknis evaluasi tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, baik evaluasi secara internal oleh pihak pengelola dana BOS dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara BOS, juga dilakukan pemeriksaan secara eksternal oleh instansi di atasnya dalam hal ini Tim Manajemen dana BOS Dinas Pendidikan, Inspektorat dan bahkan dari BPK. Evaluasi dan pengawasan tersebut dilakukan tentunya sesuai koridornya dan kewenangannya masing-masing, agar tidak tumpang tindih dan menyalahi aturan.

Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa Perencanaan keuangan SDN Cangkring 03 disusun dengan cara membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik untuk rencana jangka panjang yang termaktub dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) maupun dalam Rencana Jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan rencana anggaran diawali dengan identifikasi tujuan setelah mengkaji visi, misi sekolah dan melakukan evaluasi diri sekolah (EDS), selanjutnya pihak sekolah akan mengoleksi program-program yang diajukan oleh para guru,

kemudian memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak, yang prioritas akan mendapat dukungan moril maupun materil dari pihak sekolah yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu program kerja yang ditetapkan dalam RKT dan RKAS, sementara yang belum dijadikan prioritas tetap mendapat suport dan dukungan, akan tetapi pelaksanaannya tidak secara permanen ditetapkan dalam RKAS.

Pada awal tahun pelajaran Para Pembina, pelatih dan guru diminta oleh pihak sekolah untuk mengajukan program kerja yang disertai anggaran kegiatannya. Artinya ada koordinasi yang baik antara manajemen/pengelola keuangan dalam hal ini dana BOS dengan program KBM yang dilakukan oleh guru.

Kemudian dalam penyusunan RKAS ada pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas. Prioritas utamanya adalah terlaksananya kegiatan utama yaitu pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, remedial dan pengayaan. Selebihnya untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan penguatan pendidikan karakter. Pengalokasian juga berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti 20 % untuk pembelian buku dan 15 % untuk Gaji atau honor guru dan karyawan sekolah.

Pengelola dana BOS juga membuat perencanaan anggaran yang menjabarkan tujuan dalam tampilan operasional yang dapat di ukur. Tampilan operasional yang dimaksud adalah RKAS, di mana RKAS itu memuat berbagai macam program yang akan dikerjakan, mulai dari yang bersifat harian, bulanan atau pun yang sifatnya jangka panjang kedepan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan anggaran keuangan dari Dana BOS SDN Cangkring 03 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan manajemen pengelolaan BOS yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana sekolah diberi kebebasan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan walaupun ada beberapa komponen yang sudah ditetapkan prosentase alokasinya oleh pemerintah berdasarkan juknis BOS.

Walaupun demikian pengelola dana BOS SDN Cangkring 03 tentunya masih banyak menjumpai kendala dalam merencanakan penggunaan anggaran dana BOS, seperti: 1). Besaran anggaran yang diajukan oleh penanggungjawab kegiatan, pelatih dan pembina kegiatan sekolah melampaui pagu anggaran yang ada. Sementara mereka menuntut semua kegiatannya harus berjalan. 2). Kurangnya pro aktif dan keterlambatan guru, pelatih, Pembina dan penanggung jawab dalam menyusun dan menyetorkan anggaran kepada pengelola dana BOS, sementara RKAS sudah harus dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten, akhirnya pengelola BOS sekolah kurang mengakomodir anggaran kegiatan yang akan mereka laksanakan. Hal inilah yang harus segera dicari solusinya yang terbaik demi kelancaran program sekolah.

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan anggaran keuangan SDN Cangkring 03 berdasarkan temuan dilapangan mengacu pada peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX pasal 62 tentang standar pembiayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional sekolah (BOS) yaitu dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan pengelola dana BOS melakukan pembukuan dengan mencatat berbagai sumber dana yang masuk

beserta jumlahnya, dan distribusi penggunaannya secara rinci serta menyetorkan pajak yang harus dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku.

Adapun buku yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS adalah: 1. Buku Kas Umum (BKU) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang yang meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga. 2. Buku Kas Pembantu (BKP) untuk mencatat tiap transaksi tunai data terlampir. 3. Buku Pembantu Bank (BPB) untuk mencatat tiap transaksi melalui bank, baik cek, giro maupun tunai data terlampir. 4. Buku Pembantu Pajak (BPP) untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak data terlampir.

Selain dilakukan pembukuan di atas, kepala sekolah membuat Berita acara pemeriksaan kas yang dilakukan setiap akhir bulan dengan cara menutup BKU diakhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Pencatatan penerimaan dana BOS yang dilakukan bendahara SDN Cangkring 03 adalah dengan cara dana BOS yang masuk ke rekening sekolah ditarik oleh bendahara dan kepala sekolah kemudian dicatat didalam buku kas umum dan buku kas pembantu BOS. Kemudian baru sekolah dapat membelanjakannya untuk kepentingan kegiatan dan program sekolah sesuai RKAS. Segala pengeluaran keuangan dicatat oleh bendahara di dalam buku kas pembantu secara rinci.

Dari pembahasan diatas pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SDN Cangkring 03 selalu mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam juknis bos sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya didalam RKAS. Artinya pengeluaran yang digunakan untuk program sekolah tidak lari dari 11 komponen pembiayaan yang ada dalam juknis BOS. Dengan demikian pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SDN Cangkring 03 sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Namun diakui oleh Pengelola Dana BOS dalam melaksanakan penggunaan anggaran tidak selalu berjalan mulus sesuai RKAS, karena masih sering menghadapi kendala yang diluar dugaan, seperti : 1). Pengeluaran dana BOS insidental untuk program diluar RKAS, yang tidak dianggarkan sebelumnya di RKAS, hal inilah sulit untuk dilaporkan dan dibukukan karena tidak ada dalam juknis BOS; 2). Pencairan dana BOS yang sering terlambat, sementara kegiatan sekolah harus tetap berjalan, akhirnya sekolah harus berhutang ke sana-sini mencari dana talangan. Hal ini yang sering menghambat kelancaran kegiatan sekolah.

Evaluasi dan Pertanggungjawaban Anggaran BOS

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Dana BOS di SDN Cangkring 03 berdasarkan temuan di lapangan dilakukan dengan baik oleh pengelola dana BOS sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, oleh Inspektorat, dan BPK. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, baik evaluasi secara internal oleh pihak pengelola dana BOS dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara BOS setiap akhir bulan yang diketahui oleh komite sekolah, juga dilakukan pemeriksaan secara eksternal oleh instansi vertikal diatasnya dalam hal ini Tim Manajemen dana BOS Kabupaten, Inspektorat, dan BPK setiap akhir triwulan.

Evaluasi dan pengawasan ini yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan juknis dan regulasi yang berlaku, kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan perencanaan yang ditetapkan, kendala dan kesulitan yang dihadapi serta untuk mengukur ketepatan pelaksanaan program sesuai waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan pengawasan anggaran sudah dilakukan dengan baik, secara internal oleh Pengelola dana BOS SDN Cangkring 03 dan secara eksternal oleh Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan kabupaten Bandung, inspektorat serta BPK.

Namun demikian pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut masih sering menjumpai berbagai persoalan, seperti : 1). Kesalah fahaman antara pengelola dana BOS sekolah dengan Tim Manajemen BOS kabupaten serta Inspektorat dalam menafsirkan petunjuk teknis dana BOS, sehingga sering terjadi benturan dan akhirnya jadi bahan temuan pelanggaran penggunaan dana BOS; 2). Pengarsipan dokumen laporan pertanggungjawaban BOS yang dilakukan instansi vertikal ke atas kurang baik dan tidak satu atap 3). Kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana BOS yang bukan peruntukannya tetapi itu harus keluar. Khususnya pengeluaran dana kegiatan diluar kegiatan yang sudah dianggarkan dalam di RKAS. 4). Juknis BOS yang hampir setiap tahun berubah-ubah ini juga yang membuat pengelola dana BOS disekolah kesulitan dalam menguasai dan memahami juknis tersebut, sehingga sering terjadi kesalahfahaman antara pengelola BOS sekolah dengan pengawas dan pemeriksa laporan BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang pertama perencanaan anggaran Dana BOS SDN Cangkring 03 telah dilaksanakan oleh pengelola sebagaimana mestinya sesuai standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis BOS yang tertuang di dalam RKAS yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Akan tetapi pengelola dana BOS SDN Cangkring 03 masih menjumpai kendala dalam merencanakan penggunaan anggaran dana BOS, seperti: a). Besar ananggaran yang diajukan oleh penanggung jawab program kegiatan sekolah melampaui pagu anggaran yang ada. b). Keterlambatan penanggung jawab program kegiatan sekolah dalam menyusun dan menyetorkan anggaran kepada pengelola dana BOS, sehingga tidak terakomodir.

Pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SDN Cangkring 03 selalu mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam juknis BOS sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. Namun Pengelola Dana BOS masih sering menghadapi kendala, seperti a). Pengeluaran dana BOS insidental untuk program diluar RKAS, yang tidak dianggarkan sebelumnya di RKAS, b). Pencairan dana BOS yang sering terlambat, akhirnya sekolah harus berhutang mencari dana talangan demi kelancaran kegiatan sekolah.

Evaluasi, pertanggungjawaban dan pengawasan anggaran dana BOS sudah

dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS, secara internal oleh Pengelola dana BOS SDN Cangkring 03 dan secara eksternal oleh Tim Manajemen BOS kabupaten, inspektorat setiap akhir triwulan serta ada pengawasan dari BPK. Namun demikian dalam pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut masih sering dijumpai berbagai persoalan, seperti:

1. Kesalahpahaman antara pengelola dana BOS sekolah dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten serta Inspektorat dalam menafsirkan petunjuk teknis dana BOS,
2. Pengarsipan dokumen laporan pertanggungjawaban BOS yang dilakukan instansi vertikal ke atas kurang baik dan tidak satu atap.
3. Kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana BOS diluar kegiatan yang sudah dianggarkan dalam di RKAS.
4. Juknis BOS yang hampir setiap tahun berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, N. (2000). Studi Tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Helmawati (2015). Sistem Informasi Manajemen PAI. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Kadarman, A.M. dan Yusuf, U. (1992). Pengantar Ilmu Manajemen : Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, L. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mulyasa, E. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Munajat, N. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Permendikbud RI nomor 06 tahun (2021). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Dirjen Kemenhumham
- Permendikbud RI nomor 26 tahun.(2017). Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Dirjen Kemenhumham
- Qomusuddin, I. F., & Romlah, S. (2021). *Analisis Data Kuantitatif dengan Program IBM SPSS Statistic 20.0 - Ivan Fanani Qomusuddin, M.Pd., M.T., Siti Romlah, M.Ag. - Google Buku*. Deepublish.
- Ramayulis.(2008). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia
- Robbin dan Coulter. (2007). Manajemen (edisi kedelapan). Jakarta : PT Indeks.
- Sawir, A. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Supriadi.(2010). Dunia Pendidikan. Jakarta: Gramedia
- Siagian, Sondang P. (1990). Filsafah Administrasi. Jakarta : CV Masaagung
- Tilaar, H.A.R. dan Nugroho, R. (2008). Kebijakan Pendidikan. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. (2009). Manajemen pendidikan. Jakarta: Alfabeta

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.

Usman, Husaini (2006). Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara.

Zulpikar.(2011). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Smp Negeri Ii Jati Agung Lampung Selatan. Lampung: Universitas Lampung